

Pengaruh Penerapan SAKD, Kapasitas SDM Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas LKPD

Ruslina Lisda¹⁾, Liza Laila Nurwulan²⁾, Rahmi Syifa Alifa³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
Jl. tamansari No. 8 Bandung, 022-4233646 / 022-4233646
e-mail: ruslina_lisda@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif verifikatif dengan menggunakan data primer. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan nonprobability sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah survey pada SKPD di Kota Cimahi. Secara parsial, besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13,3% kemudian besarnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 24,5% dan besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52,1%. Secara simultan, besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 89,9% dan sisanya 10,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis, yaitu audit laporan keuangan, Good Corporate Governance dan lain-lain.

Kata kunci: SAKD, Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas LKPD

1. Pendahuluan

Dentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia. Desentralisasi berhubungan erat dengan otonomi daerah. Karena, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Peraturan ini didasari oleh Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan Negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi

kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat komponen yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah meliputi faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang andal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Mardiasmo (2009:144), menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007). Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:84) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, prosedur akuntansi asset.

Kapasitas sumber daya manusia juga merupakan faktor untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Emilda:2014). Kapasitas sumber daya manusia dapat membantu untuk menghasilkan informasi, sehingga dalam proses pelaporan keuangan, sumber daya manusia sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pun otomatis akan meningkat.

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Disini kapasitas sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan Pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Yoseprinaldi,2013). Menurut Sedarmayanti (2014:286), karakteristik sumber daya manusia dilihat dari kerakteristik kemampuan (*competency*) berdasarkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Yuli:2016)

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting untuk meningkatkan keandalan dan ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu nilai informasi dalam suatu laporan keuangan pun akan meningkat. Wawan Setiawan (2009:2) menyatakan bahwa suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan,

akurat dan tepat waktu yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Jogiyanto (2009:3) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemanfaatan dalam komponen-komponen teknologi informasi berbasis komputer, yang terdiri dari: perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, data dan komunikasi data.

Berdasarkan paradigma penelitian, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

- H1: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H4: Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Cimahi. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh yang keseluruhannya berjumlah 37 SKPD. Rincian populasi disajikan dalam tabel dibawah ini:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Cimahi.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Sebagai variabel independen adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Uraian lengkap variabel independen dan pengukurannya sebagai berikut:

1. Variabel Independen
 - a. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Variabel ini diukur dengan 4 dimensi yaitu : (1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, (2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, (3) Prosedur Akuntansi Aset, (4) Prosedur Akuntansi Selain Aset.
 - b. Kapasitas Sumber Daya Manusia
Variabel ini diukur dengan 3 dimensi yaitu : (1) Pengetahuan (*knowledge*), (2) Keterampilan (*skill*), (3) Sikap (*attitude*).
 - c. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Variabel ini diukur dengan 3 dimensi yaitu : (1) Perangkat Keras Komputer, (2) Perangkat Lunak Komputer, (3) Data dan Komunikasi Data.
2. Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan 4 dimensi yaitu : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara individual mampu menjelaskan variabel dependen yang dilakukan dengan regresi linier berganda. Dan pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara bersama mampu menjelaskan variabel dependen yang dilakukan dengan regresi linier berganda.

TABEL 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	30.285	7.594		3.988	.000
Penerapan SAKD (X ₁)	.342	.074	.052	4.621	.000

Kapasitas SDM (X ₂)	.249	.063	.371	3.951	.000
Pemanfaatan TI (X ₃)	.537	.083	.664	6.483	.000

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD (Y)

Koefisien Determinasi

TABEL 2. Koefisien Determinasi Simultasn

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948	.899	.747	3.12876

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan TI (X3), Penerapan SAKD (X1), Kapasitas SDM (X2)
 b. Dependent Variable: Kualitas LKPD (Y)

Pada tabel.2 diatas diketahui nilai R-square (0,899) yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD) yaitu sebesar 89,9%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan memberikan pengaruh sebesar 89,9% terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 10,1% merupakan pengaruh faktor lain di luar variabel yang sedang diteliti, seperti audit laporan keuangan, *Good Corporate Governance* dan lain-lain.

Besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus *beta x zero order*.

TABEL 3. Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients ^a			
Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	(Constant)		
	Penerapan SAKD (X1)	.452	.296
	Kapasitas SDM (X2)	.371	.663
	Pemanfaatan TI (X3)	.664	.810

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD (Y)

Besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat $0,452 \times 0,296 = 0,133$ atau 13,3%. Kemudian besar pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi = $0,371 \times 0,663 = 0,245$ atau 24,5%. Dan terakhir besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi = $0,664 \times 0,819 = 0,521$ atau 52,1%. Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bahwa diantara ketiga variabel independen, pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang paling besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi yaitu sebesar 52,1%.

3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dilakukan uji hipotesis penelitian. Keputusan pengujian (penerimaan/penolakan H₀) dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi dengan nol. Apabila terdapat nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, maka H₀ ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi sama dengan nol, maka H₀ diterima. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi/ $\beta = 0,342$. Karena koefisien regresi variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah lebih besar dari nol, maka diputuskan untuk H₀ ditolak sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial memberikan pengaruh sebesar 13,3% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.

3.2 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dilakukan uji hipotesis penelitian . Keputusan pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi dengan nol. Apabila terdapat nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi sama dengan nol, maka H_0 diterima. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi $\beta = 0,249$. Karena koefisien regresi variabel kapasitas sumber daya manusia lebih besar dari nol, maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia secara parsial memberikan pengaruh sebesar 24,5% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.

3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dilakukan uji hipotesis penelitian . Keputusan pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi dengan nol. Apabila terdapat nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi sama dengan nol, maka H_0 diterima. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi $\beta = 0,537$. Karena koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari nol, maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial memberikan pengaruh sebesar 52,1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.

3.4 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara simultan dilakukan uji hipotesis penelitian. Keputusan pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi dengan nol. Apabila terdapat nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi sama dengan nol, maka H_0 diterima. Dapat dilihat koefisien regresi ketiga variabel independen lebih besar dari nol. Karena koefisien regresi dari ketiga variabel independen lebih besar dari nol maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD di Kota Cimahi sudah masuk dalam kategori “Sangat Memadai”. Hal ini di dukung dengan tercapainya indikator dalam setiap dimensi-dimensi variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas..
2. Kapasitas sumber daya manusia pada SKPD di Kota Cimahi sudah masuk dalam kategori “Sangat Kompeten”. Hal ini di dukung dengan tercapainya indikator dalam setiap dimensi-dimensi variabel kapasitas sumber daya manusia, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude).
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada SKPD di Kota Cimahi sudah masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini di dukung dengan tercapainya indikator dalam setiap dimensi-dimensi variabel pemanfaatan teknologi informasi, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, data dan komunikasi data.
4. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi sudah masuk dalam kategori “Sangat Berkualitas”. Hal ini di dukung dengan tercapainya indikator dalam setiap dimensi-dimensi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

5. Secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 13,3%. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 24,5%. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 52,1%.
6. Secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu 89,9%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 10,1% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang sedang diteliti, seperti audit laporan keuangan, Good Corporate Governance dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi Instansi
Sebaiknya instansi perlu melakukan pengecekan dan penggantian pada perangkat keras komputer yaitu pada Input Unit, Output Unit dan Central Processing Unit (CPU) secara teratur serta memberikan communication link pada setiap pemakai tertentu secara optimal
2. Bagi Peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, hasil riset ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan riset sejenis. Perlu dikaji lebih mendalam variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam penentuan sampel agar lebih terperinci dan fokus, dapat menggunakan metode sensus dalam skala besar, sehingga akan lebih mewakili dan mampu memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti. Sehingga penulis memberi saran untuk peneliti yang selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] Halim, Abdul dan Syam Kusufi, Muhammad. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Heri. 2012. *Mengenal dan Memahami Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS.
- [4] Jugiyanto. 2009. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [5] Kadir, Abdul. 2014. *Pengenal Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- [6] Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- [7] Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Nuraini. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Yayasan Ainisyam.
- [9] Priansa, Donni Juni. 2014. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Puspitawati, Lilis dan Anggadini, Sri Dewi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi II Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [11] Rasdianto, Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- [12] Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Referensi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negara Sipil*. Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama.
- [13] Setiawan, Wawan. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: UPI.
- [14] Sugiyono. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- [15] Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Linggajaya.
- [16] Sutabri, Tata. 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [17] Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- [18] Wirawan. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- [19] Yani. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mitrawacana Media.

Peraturan-Pemerintah

- [20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- [21] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- [22] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [23] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [24] Undang Undang No. 9 tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- [25] Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- [26] Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- [27] Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Jurnal Penelitian:

- [28] Atika, Yuli. 2016. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Riau)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Riau, Pekanbaru.
- [29] Harnoni. 2016. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- [30] Indisari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir)*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- [31] Nurillah, As Syifa dan Muid, Dul. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Depok)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [32] Pramudiarta, Rizal. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- [33] Soimah, Siti. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Jurnal Akuntansi. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- [34] Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang.